

ABSTRAKSI

Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini untuk menjamin perkembangan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berkenaan dengan azas desentralisasi itulah otonomi diberikan kepada suatu daerah, untuk itu kepada daerah diberikan wewenang untuk mengelola sumber-sumber pendapatan di daerahnya sendiri, salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah. Dari keempat sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yang lebih menunjukkan adanya pelimpahan kewenangan atau otonomi dari pusat kepada daerah adalah penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah.

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Propinsi Jawa Timur menuntut Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur sebagai unit pelaksana Pemerintah Propinsi Jawa Timur dibidang jalan untuk menggali PAD dilingkungannya, salah satu PAD yang potensial dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur adalah dari pemanfaatan Daerah Milik Jalan. Mengingat Kota Surabaya penghasil PAD dari pemanfaatan Daerah Milik jalan yang terbesar maka Balai Pemeliharaan Jalan Surabaya dituntut untuk mewujudkan tertib pemanfaatan Daerah Milik Jalan hal ini sesuai dengan Perda Propinsi Jawa Timur No. 21 Tahun 2000 tentang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur. Ada beberapa potensi yang dimiliki oleh Balai Pemeliharaan Jalan Surabaya untuk dapat memunggut pajak pemanfaatan Daerah Milik Jalan yaitu *Pertama* Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta yang mempunyai letak geografis yang strategis sebagai pintu gerbang masuk wilayah Indonesia bagian Timur Indonesia sangat mendukung kedudukan Surabaya sebagai jalur perdagangan. *Kedua* Surabaya merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. *Ketiga* dengan adanya Perda Propinsi Jawa Timur No. 9 tahun 2002 tentang Pemanfaatan Daerah Milik Jalan.

Namun pada kenyataannya penerimaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dari pajak pemanfaatan Daerah Milik Jalan relatif cukup kecil dibandingkan dengan potensi yang ada, hal ini mengingat semakin berkembangnya pembangunan disepanjang jaringan jalan baik Nasional maupun Propinsi, maka akan berpengaruh kepada fungsi jalan yang ada. Untuk itu Pemerintah Jawa Timur melakukan beberapa upaya antara lain dengan menertibkan pemanfaatan Daerah Milik Jalan, menetapkan tarif pajak, menerbitkan proses perizinan dan melakukan koordinasi antar instansi yang terkait dengan pemanfaatan Daerah Milik Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Daerah Milik Jalan di wilayah Balai Pemeliharaan Jalan Surabaya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Jawa Timur No. 9 Tahun 2002.

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Surabaya, yaitu dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Dinas PU Bina Marga Propinsi Jawa Timur, Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur, Balai Pemeliharaan Jalan Surabaya dan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur. Pertimbangan diambilnya dinas-dinas tersebut atas dasar bahwa Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagai aparat penerbitan Perda Jatim No. 9 Tahun 2002, Dinas PU Bina Marga Propinsi Jawa Timur sebagai aparat pelaksana, Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur sebagai penerima PAD dari sektor pemanfaatan Daerah Milik Jalan, Balai Pemeliharaan Jalan Surabaya sebagai unit pelaksana pemanfaatan Daerah Milik Jalan dan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur sebagai pengatur Lalu Lintas di jalan Nasional dan Propinsi.

Selanjutnya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif dimana peneliti hendak mengungkap untuk kemudian memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Daerah Milik Jalan di wilayah Balai Pemeliharaan Jalan Surabaya, sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata yang diperoleh dari informan serta data tambahan dari tabel dan gambar dari dokumen dan literatur yang mendukung.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Daerah Milik Jalan di wilayah Balai Pemeliharaan Jalan Surabaya dalam pelaksanaannya belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya penyerobot tanah Daerah Milik Jalan, tidak sesuainya penanaman utilitas maupun selain utilitas dengan peraturan yang ada sehingga Peraturan Daerah Jawa Timur No. 9 Tahun 2002 belum terwujud. Belum terwujudnya tujuan serta banyak kekurangan dan hambatan yang ditemui dalam setiap tahap Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Daerah Milik Jalan karena tidak adanya sanksi hukum yang jejas kepada mereka yang melanggar.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Daerah Milik Jalan berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah: *Struktur Birokrasi*; dalam implementasi kebijakan ini kurang berjalan efektif dan efisien karena adanya fragmentasi dan kurangnya pengawasan terhadap hasil rekomendasi, *Sumber Daya*; ketersediaan sumber daya utamanya dana dan manusia kurang memadai, *Komunikasi*; komunikasi yang ada pada lembaga pelaksana dan instansi pendukung kebijakan dengan pengguna Daerah Milik Jalan belum berjalan dengan baik, *Disposisi/Sikap Pelaksana*; ditengarai adanya kemungkinan main mata baik dengan kelompok sasaran maupun dengan para kontraktor pelaksana Daerah Milik Jalan, hal ini dapat dikatakan demikian karena banyaknya permasalahan dari pemanfaatan Daerah Milik Jalan yang mencuat ke masyarakat, *Dukungan Kelompok Sasaran*; dukungan dari para pengguna Daerah Milik Jalan sangat rendah karena faktor ekonomi, *Kepentingan yang dipengaruhi kebijakan*; adanya benturan kepentingan antara pihak pemerintah, pengguna Daerah Milik Jalan dan masyarakat. Pemerintah disatu sisi untuk meningkatkan PAD dan mengembalikan fungsi jalan dari pengguna Daerah Milik Jalan untuk utilitas memberikan pelayanan kepada masyarakat.